

STRATEGI PENGAWASAN LURAH TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN LAWAWOI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Evi, ²⁾Herman Dema, ³⁾Muhammad Rusdi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
evilansisumarni@gmail.com

Abstrak

Strategi pengawasan lurah di kantor Kelurahan Lawawoi dan bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor Kelurahan Lawawoi dan untuk mengetahui strategi pengawasan lurah terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor Kelurahan Lawawoi Kecamatan wattang puluh Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah 859 Kepala Keluarga yang dimana pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Probability Sampling*, dengan teknik *sampling acak/random sampling* dengan menggunakan Rumus *Yount* 10% dengan jumlah sampel 86 Kepala Keluarga, Penelitian ini menggunakan Metode *Deskriptif Kuantitatif*. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Kuisisioner, dan Dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase Strategi Pengawasan di kantor kelurahan lawawoi kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 75,5% dengan kategori baik, efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor kelurahan Lawawoi Kecamatan wattang puluh Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 48,00% dengan kategori cukup baik dan Strategi pengawasan lurah terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di kantor kelurahan Lawawoi Kecamatan wattang puluh Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 16,0% dengan kategori berpengaruh.

Kata Kunci : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Abstract

The purpose of this research is to determine the Lurah Supervision Strategy on the Effectiveness of Land and Building Tax (PBB) collection in Lawawoi Village, Sidenreng Rappang Regency. The population taken in this study were all household heads in the Lawawoi Village, Sidenreng Rappang Regency, as many as 859 households and a sample of 86 households. The sampling technique used is probability sampling. This type of research is descriptive quantitative. Data collection techniques are observation, interview, questionnaire (questionnaire) and literature study. The data analysis technique used in this study was descriptive statistics. Based on research that is taken from the results of the questionnaire, it is obtained that the recapitulation of variable X (Supervision Strategy) reaches a value of 75.5% including the "good" category, and the recapitulation of variable Y (effectiveness) reaches a value of 48% including the "poor" category.

Keywords: Supervision Strategy and Effectiveness

A. PENDAHULUAN

Adisasmitaa (2010) otonomi daerah adalah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Kewenangan yang dimaksud dapat berupa pengelolaan keuangan yang sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah. (Bratakusumah dan Solihin, 2001). Pajak daerah merupakan pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Sumber penerimaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 3 Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu dapat digambarkan jumlah wajib pajak yang aktif di Kantor Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 3.386 wajib pajak, dengan potensi kurang lebih Rp. 118.215.506, diberikan pula jumlah tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah tunggakan yang dimiliki adalah sebesar Rp. 19.625.000 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Untuk sementara tunggakan tersebut sementara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) untuk mendapatkan arahan yang jelas mana tunggakan yang kadaluarsa mana yang kemungkinan bisa ditagih untuk menghindari agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Besarnya tunggakan yang terjadi tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu, mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh pemerintahan daerah. Tentunya pemerintah daerah mempunyai strategi tertentu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terlebih lagi pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerahnya. Berdasarkan observasinya yang dilakukan oleh calon penelitian dengan Pak Lurah, Staff dan beberapa Masyarakat di Kantor Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang masalah yang ditemukan calon peneliti yaitu :

1. Keberhasilan Wajib Pajak PBB Pembayaran Wajib Pajak dan Bangunan yang selama ini ditemukan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan 2 tahun terakhir tidak mencapai target, dan seringkali untuk menutupi kekurangan tersebut kepala Kelurahan atau Lurah Lawawoi menggunakan uang pribadi/kas Lurah untuk membayar pajak bumi dan bangunan sambil menunggu pembayarannya dari masyarakat.
2. Ditemukan juga bahwa Kolektor/penagih pajak tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, hal ini terlihat ketika masih banyak jumlah PBB yang belum disetujui oleh Kantor Lurah Lawawoi atau tunggakan yang belum lunas
3. Kurangnya kesadaran masyarakatnya dalam membayar PBB, hal ini terlihat ketika waktu pembayarannya PBB akan tiba akan tetapi justru masyarakat tidak terlalu memperhatkannya dengan membayar PBB.
4. Kurang tegasnya pemerintahan dalam memberikan sanksi terhadap penunggak wajib PBB serta Rendahnya pengawasan pemerintah dalam pembayarannya PBB sehingga banyak masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan PBB.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul strategi pengawasan lurah terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Lawawoi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk Mengetahui strategi pengawasan Lurah terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian

hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Suledan saifullah (2005:317). Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, menurut Sule dan Saifullah (2005 : 318-319) ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kedudukan kelurahan terdapat pada pasal 209 ayat (2) kelurahan bukan lagi sebagai perangkat daerah. Melainkan menjalankan fungsi pendelegasian kewenangan yang diberikan Camat sebagai perangkat pemerintahan terendah. Sujanto pengawasan memiliki beberapa bentuk, yaitu

1. Pengawasan umum merupakan cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah.
2. Pengawasan melekat ialah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya.
3. Pengawasan langsung adalah cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (on the spot) terhadap objek yang diawasi.
4. Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan dari jarak jauh lokasi atau tempat kejadian peristiwa (TKP).

Efektivitas menurut Abdul Jabbar, Halim (2004, :129) menyatakan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004, h.2) menyatakan bahwa kontribusi output terhadap pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. (Astutik & Makmur, 2012). Sedangkan Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
3. Kepuasan kerja
4. Keuntungan berlabar
5. Pencarian sumberdaya.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Undang-Undang No.12 tahun 1994 Pasal 4 ayat(1) Tentang Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas seluasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Kelurahan Lawawoi Sebanyak 859 kepala keluarga. Jadi yang akan dijadikan sampel yaitu 86 orang/kepala keluarga. Pemilihan sampel dalam penelitiannya ini menggunakan *probability Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan Observasi, Kuisisioner, wawancara dan kepustakaan sedangkan teknik analisis data yang digunakannya adalah teknik analisis data kuantitatif. Definisi Operasional Variabel Menurut (Ahmad, 2015) definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara operasional, praktik, riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian/obyek yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Pengawasan. Rekapitulasi responden mengenai indikator pengawasan

Hasil rata-rata persentase dari 4 pertanyaan pada indikator pengawasan diatas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 75,5%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator pengawasan ini berada dikategori baik/sesuai.

2. Efektivitas. Rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator Efektivitas

Hasil rata-rata persentase dari 4 pertanyaan pada indikator prestasi kerja di atas, maka didapatkan hasil rata-rata

persentase yaitu 48%. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator efektivitas kerja ini berada di kategori kurang sesuai/kurang baik. Adapun total keseluruhan dari nilai dari Variabel X (Strategi pengawasan) adalah 1021. Untuk mengetahui jumlah persentasenya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil peneliti dari indikator pengawasan, Maka didapatkan hasil presentase yaitu 75,5 %. jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada strategi pengawasa ini berada di kategorikan baik / sesuai.
2. Berdasarkan hasil peneliti dari indikator Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Maka didapatkan hasil presentase yaitu 48%. jadi dapat ditarik suatu kesimpulan pada Efektivitas ini berada di kategorikan kurang baik / Tidak sesuai.

E. REFERENSI

- Ahmad Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta. Gama Media.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi VI. Yogyakarta: Rhineka Cipta
- Labolo Muhadam. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada,
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sellang, K. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ombak.
- Steers, Richard, 2016. *Efektivitas Organisasi*. : Jakarta: Rieneka Cipta.
- The Liang Gie, 2014. *Perilaku Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Zainuddin. (2017). *Teori-Teori Mutakhir dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik*.: Makassar: Phinatama Media

Jurnal :

- Anggraeni, D. (2011). Analisis strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan (pbb) di kotasurabaya terhadap peningkatan realisasi target penerimaannya dari tahun 2006-2011. *E-Journal*.
- Astutik, T.P., & Makmur, M. (2012). Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada dinas pendapatan asli daerah kotamalang). *E-Journal*, 2(1), 47–52.
- Atmasepa, D.T. (2015). Pengawasan badan pendapat daerah terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan (pbb) di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru tahun 2015. *E-Journal*, 4(2), 1–15.
- Gunawan, Yogiagus. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. *E-Journal*.
- Hermansyah, A.A. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dispenda Kota Makasar. *Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara*.
- ida Ayu Metha Apsari Prathiwi, Nyoman Trisna Herawati, N.L.G.E.S. (2015). Analisis strategi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb-p2) serta efektivitas penerimaannya di pemerintah ah kota Denpasar tahun 2013-2014. *E-Journal*, 3(1).
- Indah K. Rumengan, David Paul Elia Saerang, T.R. (2016). Analisis efektivitas dan strategi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (pbb-p2) di dinas pengelola keuangan pendapatan dan aset kabupaten minahasa selatan. *E-Journal*, 16(04), 763–772.
- SURYANI, E. (2016). Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dinas pendapatan kabupaten pesawaran dalam peningkatan pendapatan asli daerah (pad). *Journal Article*.

Dokumen :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan

Permendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang TahapanPersiapan Pengalihan PajakBumi dan Bangunan Pedesaan danPerkotaan sebagai PajakDaerah.

UndangUndang Nomor23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 pasal1 ayat(2) Tentang Kelurahan